

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DESA ORO-ORO OMBO KECAMATAN BATU**

SKRIPSI



OLEH:

IVON MARTINI SOGARA

2018210212

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu. Kemiskinan yang akan dikurangi dalam negara dilakukan melalui pemberian kebebasan khusus untuk desa dan diberikan hak mengurus rumah tangganya sendiri dengan program melakukan masyarakat dapat sejahtera melalui bumdes. Melalui hal itulah sistem dan ekonomi yang dilembagakan yang terdapat pada desa keefektifannya tidak dapat baik dalam prosesnya dan juga mempunyai implikasi dalam bergantungnya pada pemerintah melalui bantuan dan sangat tidak layak untuk dilakukan karena mematikan perjuangan dalam mengelola desa untuk menjadi mandiri. Perlunya bercermin dari masa lampau dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan lembaga yang didirikan dan akan dikelola masyarakat yang berada di desa, dan lambat laun lembaga tersebut diinstruksikan pemerintah untuk tidak mendirikan lembaga dalam bidang ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Sagita, Mutimatun dan SH (2017) kelembagaan yang terdapat di desa yang mempunyai usaha dan telah dikelola masyarakatnya sendiri bersama dengan desa dalam hal ini pemerintahnya yang dilakukannya bertujuan untuk melakukan penguatan bidang ekonomi pada desa tersebut yang mempunyai bentuk sesuai kelebihan desa yang akan dijadikan potensi dan menjadi kebutuhan disebut dengan Bumdes kepanjangan dari badan usaha milik desa. Aktivitas yang dilakukan pada bidang ekonomi yang telah menjadi pilar untuk desa yang fungsinya pada sosial menjadi lembaga dan juga komersial disebut Bumdes. Peranan dari Bumdes berlembaga sosial karena pihaknya pada rakyat karena memang urusannya berfokus pada masyarakatnya dengan ketersediaan layanan berbasis sosial. Keuntungan yang menjadi tujuan yang hakiki dalam wilayah komersial sesuai tawaran di pasar lokal yang telah menjadi sumber dari daya. Bumdes melaksanakan sistem dalam bekerja di aktivitas ekonomi pada masyarakatnya yang tersedianya lembaga berbadan usaha yang pengelolaannya dilakukan dengan cara yang sangat profesional yang berpatokan sesuai potensinya di desa (Fitriska, 2017). Melalui hal inilah yang menjadi usahanya masyarakat setempat menjadi efektif dan juga produktivitasnya.

Kemiskinan yang akan dikurangi dalam negara dilakukan melalui pemberian kebebasan khusus untuk desa dan diberikan hak mengurus rumah tangganya sendiri

dengan program melakukan masyarakat dapat sejahtera melalui bumdes. Melalui hal itulah sistem dan ekonomi yang dilembagakan yang terdapat pada desa keefektifannya tidak dapat baik dalam prosesnya dan juga mempunyai implikasi dalam bergantungnya pada pemerintah melalui bantuan dan sangat tidak layak untuk dilakukan karena mematkan perjuangan dalam mengelola desa untuk menjadi mandiri. Perlunya bercermin dari masa lampau dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan lembaga yang didirikan dan akan dikelola masyarakat yang berada di desa, dan lambat laun lembaga tersebut diinstruksikan pemerintah untuk tidak mendirikan lembaga dalam bidang ekonomi.

Kendalanya yang dialaminya desa oro-oro ombo pada bumdes dalam pemberdayaan seperti SDM yang terbilang kurang saat melakukan bumdes dengan pengelolaannya. Sesuai nomor dua belas tahun dua ribu delapan bahwa desa diberikan kesempatan berdirikan bumdes. Kesesuaiannya potensi dan juga yang dibutuhkan desa untuk kesejahteraan rakyat adalah tujuannya, dan melalui rencana yang dikerjakan oleh desa menjadi penting jika masyarakatnya terlibat dalam mekanisme kerja desa. Persoalan modal sudah tersedia di desa dan juga sekolah dalam kemandirian masyarakatnya serta bumdes dengan pengurusnya. Akan tetapi pada desa lokasi penelitian masalahnya yaitu secara fungsinya bumdes terbilang kurang dan belum sesuai karena sadarnya rakyat menjadi alasan. Ketidapkahaman bumdes oleh pengurus menjadikannya tidak mempunyai perkembangan.

Masalah yang terjadi pada desa lokasi penelitian sudah berdiri akan tetapi belum mempunyai perkembangan dan laba belum tercapai yang seharusnya laba adalah

solusi dari hambatan. Melalui bidang ekonomi yang dilembagakan tentunya tujuannya yaitu masyarakat melalui pendapatan dapat tercapai tujuannya bila setiap program dilaksanakan melalui usaha mikronya dibuka agar tersalurnya masyarakat mengkoordinasikan dan juga dibimbingnya sampai bertambah nilai penjualannya yang terbilang ramai usaha kecil yang saling berkoordinasi dan juga pembimbingan menjadikan mutunya dapat bertambah yang terbilang tinggi nilai dari jualnya.

Sesuai beberapa masalah dan juga hambatannya yang dijelaskan sehingga diambillah judul yaitu “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.

2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya yaitu:

1. Secara teoritis, dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah yang nantinya dilakukan ilmiah dengan penjelasan variabel penelitian dan juga menjadikan sumber informasi yang diperoleh yang berbasis teoritis.
2. Secara praktis, nantinya setelah selesai pendidikan akan dipraktekkan ke lokasi tempat bekerja dalam penerapan akan keilmuan yang sudah dicapai dan dapat dikonsumsi dengan menjadikannya sebagai kesimpulan permasalahan pada kesesuaian variabel agar masyarakat selalu update informasi.
3. Manfaat akademik, sebagai bentuk mengembangkan keilmuan dan juga dijadikan pedoman para pembaca dan juga pemanfaatan dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang perekonomian dan juga memperkaya literasi di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. V. (2016). *Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi pinangan perempuan terhadap laki-laki di Dusun Badu Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40.
- Asbeni, E. (2013). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas. *JPMIS*.
- Budi, W. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Chabiba, A. M. N. (2018). Integrasi Muatan Karakter Melalui Pembelajaran SBdP di SDN Jajartunggal III/452 Surabaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(2).
- Doyok, P. (2020). *Studi Kasus Siswa Yang Berjudi Kelas Xi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Betung Kabupaten Bengkayang* (Doctoral dissertation, IKIP PGRI Pontianak).